

ANALISIS KOMPONEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Studi Kasus di Rumah Bahasa Surabaya)

Alivia Choirun Nisak

Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: aliviachoni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis komponen pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya, dengan sub fokusnya yaitu: (1) komponen yang dibiayai, (2) sumber pembiayaan pendidikan, (3) tata cara pengalokasian biaya pendidikan, (4) akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, observasi terbuka, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Supaya dapat meningkatkan kepercayaan, maka dilaksanakan pengecekan keabsahan data melalui *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komponen yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya adalah biaya langsung yang terdiri dari biaya operasional pembelajaran dan biaya personalia; (2) sumber pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya berasal dari Pemerintah Kota Surabaya; (3) Tata cara pengalokasian biaya pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya berdasarkan kebutuhan yang dianggarkan dalam setahun; (4) akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya berada pada lingkungan pengelola keuangannya yaitu di lingkungan Bagian Kerjama Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan akuntabilitas vertikal, eksternal, dan sistem serta dipengaruhi oleh beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas yaitu kepemimpinan, koordinasi, serta legitimasi dan akseptasi.

Kata Kunci: *Komponen pembiayaan, pembiayaan pendidikan*

Abstract

This research aims to discover, to describe, and to analyse components of educational funding in *Rumah Bahasa Surabaya*, with its focuses, which are: 1) funded components; 2) resource of educational funding, 3) procedure of educational funding allocation. 4) accountability of educational funding. Qualitative data research and case study was implemented during the research. Semi-structured interview, open-observation, and documentation study were applied as data collection technique. Data analysis was done before, during, and after getting involved in the field. The validity was checked through *credibility*, *transferability*, *dependability*, and *confirmation*. The results shows that (1) the funded components in Rumah Bahasa Surabaya are direct fund consisted operational learning fund and personal fund; (2) resource of the funding is originally from Surabaya Government; (3) procedure of educational funding allocation in Rumah Bahasa Surabaya is based on planned requirements in a year; (4) Accountability of educational funding in Rumah Bahasa Surabaya is positioned on its funding management area that is in Division of Cooperation in Rumah Bahasa Surabaya by using vertical and external accountability and its system, and it is influenced with several aspects with affect the success of accountability that is, leadership, coordination, legitimacy, and acceptance.

Keyword: *component of funding, educational funding*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang garapan yang penting bagi pendidikan dalam sebuah sekolah yaitu pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyono (2010:83), pembiayaan pendidikan adalah suatu analisis tentang sumber-sumber (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan bagi pengelolaan pendidikan secara efisien untuk mencapai tujuan. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dan sekaligus menjadi bagian yang sensitif di antara aspek-aspek lainnya. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggungjawab Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tetapi juga tanggungjawab masyarakat. Pembiayaan pendidikan juga memiliki beberapa komponen penting yaitu biaya langsung dan tidak langsung.

Sejalan dengan ungkapan Akdon, dkk. (2015:23), menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan

aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Fattah (Mulyono, 2010:78), bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki komponen-komponen yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen pembiayaan pendidikan tersebut

menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Hal tersebut mudah dimengerti karena pendidikan tentu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, sebab masyarakat merupakan kelompok sasaran dari pendidikan itu sendiri. Banyak aspek yang berhubungan dengan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Salah satu aspek yaitu aspek ekonomi kini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Adanya kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), selain membuka peluang kerjasama juga memaksa masyarakat Indonesia harus mempersiapkan diri. Bukan hanya pada aspek ekonomi, namun aspek pendidikan seperti pendidikan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dibutuhkan dalam menghadapi MEA, baik dalam arti kerjasama maupun dalam arti kompetensi. MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN (*Association Of South East Asian Nations*) dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa umumnya masyarakat Indonesia hanya dibekali beberapa bahasa di sekolah formalnya, seperti: bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah. Namun, ketiga bahasa tersebut tampaknya belum cukup untuk dijadikan bekal dalam menghadapi MEA, sebab masyarakat asing yang masuk ke Indonesia merupakan masyarakat dari berbagai Negara di ASEAN dan Asia pada umumnya. Maka, masyarakat Indonesia kiranya perlu dibekali bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Mandarin, Thailand, Perancis, Arab, dan Filipina.

Belajar bahasa tentunya berkaitan dengan persoalan biaya. Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia masih belum bisa terlepas dari kemiskinan. Angka kemiskinan masyarakat Indonesia kini semakin naik. Seperti yang diberitakan *sindonews.com*, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menyebutkan bahwa pada periode September 2014 jumlah penduduk miskin masih sekitar 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari penduduk Indonesia. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat Indonesia cukup rendah.

Rumah Bahasa Surabaya merupakan sebuah lembaga atau komunitas orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa atau pun yang ingin mendalami bahasa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Lembaga ini diresmikan pada bulan Februari 2014 oleh Walikota Surabaya dan berdiri di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini merupakan salah satu respon terhadap adanya MEA. Lembaga ini memiliki keunikan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk belajar keterampilan bahasa disana. Keunikan yang dimaksud yaitu Rumah Bahasa Surabaya menyelenggarakan pendidikan keterampilan/kursus bahasa secara gratis, namun dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pendidik yang berkualitas. Lembaga ini tidak hanya memberdayakan tenaga pendidik lokal saja, namun juga tenaga pendidik dari luar negeri. Lembaga ini pun berada di pusat Kota Surabaya, sehingga mudah diakses.

Pengelolaan komponen pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya ini tidak seperti lembaga-lembaga pada umumnya yang dikelola oleh stafnya sendiri. Pengelolaan komponen pembiayaan pendidikan lembaga ini dikelola oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan penggagas program Rumah Bahasa Surabaya yang kemudian mendelegasikan Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas pembelajaran. Rumah Bahasa Surabaya menerima dana pendidikan berupa barang, bukan uang. Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya ini merupakan kegiatan pendidikan kursus yang dapat digolongkan dalam jalur pendidikan nonformal. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Adanya fenomena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kini sedang ramai diperbincangkan, membuat masyarakat lebih mempersiapkan diri. Fenomena ini menarik sebab dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek pendidikan. Selain itu, fenomena ini juga unik sebab ASEAN merupakan penggagas kebijakan integrasi ekonomi Negara-negara pertama di dunia. Persiapan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) perlu diperhatikan, sebab sumber daya manusia Negara Indonesia bisa dikatakan belum kompetitif. Seperti yang dikutip dalam *kompasiana.com* tanggal 10 Mei 2015 mengatakan bahwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, sebesar 35,88 juta, jumlah tenaga kerja Indonesia hanya memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan non sekolah. Dari gambaran ini memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia masih rendah. Dari 182 negara yang ada di dunia HDI Indonesia berada di urutan ke 111. Sementara untuk kawasan ASEAN HDI Indonesia berada di urutan ke enam dari sepuluh Negara di kawasan ASEAN. Posisi HDI Indonesia masih di bawah HDI Negara Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa sumber daya manusia Negara Indonesia masih belum kompetitif. Namun, pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Fenomena ini sangat unik dan menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul penelitian Analisis Komponen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Rumah Bahasa Surabaya). Penelitian ini perlu dilakukan sebab pendidikan, terutama pendidikan keterampilan bahasa yang tidak memungut biaya sangat penting dalam pembangunan bangsa menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga perlu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan komponen pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya. Peneliti menganggap bahwa

usaha Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan prakarsa kreatif berbasis kearifan lokal yang patut diapresiasi dan dicermati.

Fokus penelitian ini yaitu Analisis Komponen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Rumah Bahasa Surabaya). Selanjutnya dari fokus tersebut dirinci menjadi 4 sub fokus, yaitu:

1. Komponen Yang Dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya
2. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya
3. Tata Cara Pengalokasian Biaya Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya
4. Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

Berdasarkan fokus penelitian yang mengacu pada konteks penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis komponen apa saja yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sumber pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya
3. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tata cara pengalokasian biaya pendidikan yang ada di Rumah Bahasa Surabaya
4. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

Manfaat dalam penelitian analisis komponen pembiayaan pendidikan (Studi Kasus di Rumah Bahasa Surabaya) yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan/pembiayaan pendidikan, khusus pada manajemennya.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Koordinator Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada koordinator lembaga dalam mengelola komponen pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya.

- b. Bagi Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dalam mengontrol pengelolaan komponen pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya.

- c. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi dalam mengelola komponen pembiayaan pendidikan pada lembaga nonprofit.

- d. Bagi Lembaga Pendidikan Lain

Penelitian ini dapat memberikan model dan wawasan baru bagi lembaga pendidikan lain dalam mengelola komponen pembiayaan pendidikan di lembaganya, terutama dalam memberikan layanan tanpa memungut biaya.

- e. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan komparatif oleh peneliti lain jika mengambil penelitian yang sejenis, atau mengembangkan penelitian di bidang yang sama yaitu bidang pembiayaan pendidikan dengan mengambil lokasi penelitian yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan rancangan penelitian studi kasus. Sumber data penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, sumber tertulis, dan foto. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi terbuka, wawancara semistruktur dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah dilapangan (reduksi data, penyajian data, dan yang verifikasi). Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Tahap-tahap penelitian adalah tahap pra lapangan, kegiatan lapangan, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di Rumah Bahasa Surabaya menunjukkan bahwa: (1) Komponen Yang Dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya, (2) Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya, (3) Tata Cara Pengalokasian Biaya Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya, dan (4) Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya.

Hasil Penelitian

1. Komponen Yang Dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Komponen yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya yaitu biaya langsung yaitu terdiri dari:

- a. Biaya Operasional Pembelajaran (5% dari total dana)

- 1) Biaya Telepon Tiap Bulan
- 2) Biaya Langganan TV Kabel
- 3) Cetak Brosur
- 4) Cetak Kartu Anggota
- 5) Sewa Mesin Foto Copy
- 6) Kertas HVS
- 7) Spidol *White Board*
- 8) Koran
- 9) Tinta *Printer*

- b. Biaya Personalia

- 1) Gaji Pokok Tenaga Kontrak + Iuran BPJS Kesehatan + Iuran BPJS Ketenagakerjaan (75% dari total dana)
- 2) Tunjangan Konsumsi Kue dan Air Gelas (20% dari total dana)

2. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

- a. Sumber pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya adalah pendirinya sendiri yaitu Pemerintah Kota Surabaya.
 - b. Sumber pembiayaan pendidikan tersebut dikelola oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
 - c. Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya mendelegasikan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya yang kemudian diberikan kepada Rumah Bahasa Surabaya berupa barang karena mereka membelanjakan kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya.
 - d. Selain Bagian Kerjasama, Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk menyediakan *wifi* dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk menyediakan tempat beroperasinya Rumah Bahasa Surabaya yaitu di Gedung Balai Pemuda.
3. Tata Cara Pengalokasian Biaya Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya
- a. Tata cara pengalokasian dana Rumah Bahasa Surabaya berdasarkan kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya yang dianggarkan setiap tahun.
 - b. Kebutuhan di tahun 2016 dianggarkan pada bulan Oktober 2015.
 - c. Dalam pengalokasian biaya pendidikan tidak terdapat biaya perawatan gedung dan *wifi* sebab kedua biaya tersebut dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya.
4. Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya
- a. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Rumah Bahasa Surabaya memiliki tata kelola yang berbeda dengan lembaga lainnya.
 - b. Akuntabilitas keuangan Rumah Bahasa Surabaya berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
 - c. Dalam kegiatan akuntabilitas tersebut terdapat beberapa unsur yang membuat pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya berhasil melaksanakan kegiatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Kepemimpinan

Dalam kegiatan akuntabilitas, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi memimpin Stafnya supaya tepat waktu dalam melaporkan keuangan. Keadaan tersebut membuat Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi bersikap memaksa kepada Stafnya supaya menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perintah. Selain itu, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi memiliki sikap terbuka kepada Stafnya. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi memberikan saran yang bijaksana kepada Stafnya apabila Stafnya memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya.
 - 2) Koordinasi

Dalam kegiatan akuntabilitas keuangannya, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi

mengkoordinasi Stafnya mengenai kegiatan laporan keuangan. Laporan keuangan dilaporkan setiap hari pada aplikasi *online e-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi mengingatkan Stafnya saat Stafnya lengah atau bahkan lupa untuk melaporkan keuangan setelah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan.

3) Legitimasi dan akseptasi

Legitimasi terlihat bahwa Bagian Kerjasama berada dalam naungan Pemerintah Kota Surabaya dimana Pemerintah Kota Surabaya merupakan lembaga publik yang telah diakui masyarakat atas kekuasaan dan keberadaannya. Keputusan-keputusan yang ada dalam penyelenggaraan Rumah Bahasa Surabaya telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan akseptasi terlihat dalam pengalokasian dana untuk Rumah Bahasa Surabaya. Penerimaan dana oleh Rumah Bahasa Surabaya tersebut berupa barang dimana penerimaan tersebut dapat dibuktikan secara tertulis melalui nota yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

- d. Dalam kegiatan akuntabilitas terdapat beberapa jenis akuntabilitas. Pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya menggunakan beberapa jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut.

1) Akuntabilitas Sistem

Pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya sekaligus instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menggunakan akuntabilitas sistem yang bernama *E-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Laporan keuangan dilakukan setiap saat yaitu setelah berbelanja kebutuhan.

2) Akuntabilitas Vertikal

Pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya menggunakan akuntabilitas vertikal. Mereka melaporkan keuangannya kepada Wali Kota Surabaya melalui aplikasi *online e-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya dapat memantau transaksi keuangan Staf-stafnya melalui aplikasi *online* tersebut.

3) Akuntabilitas Eksternal

Selain menggunakan akuntabilitas sistem dan vertikal, Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya juga melaporkan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu tahun sekali.

PEMBAHASAN

A. Komponen Yang Dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa di Rumah Bahasa Surabaya sendiri memang tidak

diberikan kewenangan untuk mengelola biaya. Tetapi kebutuhan operasional lembaga ini dipenuhi dalam bentuk barang-barang (*in-nature*). Namun demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan sewajarnya tanpa memungut biaya dari peserta didik (gratis). Dalam proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa komponen yang dibiayai. Komponen yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya yaitu biaya langsung. Biaya langsung yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya adalah:

1. Biaya Operasional Pembelajaran (5% dari total dana)
 - a. Biaya Telepon Tiap Bulan
 - b. Biaya Langganan TV Kabel
 - c. Cetak Brosur
 - d. Cetak Kartu Anggota
 - e. Sewa Mesin Foto Copy
 - f. Kertas HVS
 - g. Spidol White Board
 - h. Koran
 - i. Tinta Printer
2. Biaya Personalia
 - a. Gaji Pokok Tenaga Kontrak + Iuran BPJS Kesehatan + Iuran BPJS Ketenagakerjaan (75% dari total dana)
 - b. Tunjangan Konsumsi Kue dan Air Gelas (20% dari total dana)

Hal ini sejalan dengan ungkapan Mulyasa (2003:48) yang mengatakan bahwa biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Senada dengan Akdon, dkk (2015:14), biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat, kantor, WC, sarana ibadah, gudang, laboratorium), ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Sanada pula dengan pendapat Cohn, dkk. (Fattah, 2012:23), bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, saran belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

Gaji pokok tenaga kontrak yang dimaksud merupakan gaji untuk 7 Staf yang sekaligus menjadi tenaga pendidik dan 1 tenaga kebersihan. Sedangkan tunjangan konsumsi kue dan air gelas untuk seluruh tenaga pendidik, termasuk tenaga pendidik *volunteer* yang mengajar pada hari tertentu.

Dengan biaya pengeluaran tersebut pengelola berusaha memaksimalkan fasilitasnya sehingga dapat menarik minat masyarakat. Dalam sehari, peserta didik yang mengikuti pembelajaran di Rumah Bahasa Surabaya sebanyak 161 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya pembelajaran mengenai

keterampilan bahasa yang gratis di Rumah Bahasa Surabaya ini.

Sehubungan dengan biaya langsung di Rumah Bahasa Surabaya tersebut peserta didik tidak ditarik biaya apapun. Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik tidak mengeluarkan dana untuk memenuhi biaya langsung di Rumah Bahasa Surabaya.

B. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya dimana sumber pembiayaan pendidikan umumnya berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan juga orang tua/wali murid. Sumber pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya adalah dari pendirinya sendiri yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Sumber dana tersebut dikelola oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya mendelegasikan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk menyediakan *wifi* dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya untuk menyediakan tempat beroperasinya Rumah Bahasa Surabaya yaitu di Gedung Balai Pemuda. Sumber pembiayaan pendidikan tersebut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Temuan ini dapat digolongkan terhadap sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut menyusun semua penerimaan dan pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Matin (2014:120-121), mengungkapkan bahwa sumber dana pendidikan adalah berasal dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dari orang tua siswa, dari masyarakat, dari yayasan dan perusahaan, dan dari bantuan luar negeri. Sumber dana pendidikan dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari

yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dana pendidikan yang diterima oleh Rumah Bahasa Surabaya merupakan pendapatan asli daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dibayar oleh masyarakat Kota Surabaya sendiri.

C. Tata Cara Pengalokasian Biaya Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tata cara pengalokasian biaya pendidikan Rumah Bahasa Surabaya berdasarkan kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya yang dianggarkan selama setahun. Kebutuhan di tahun 2016 dianggarkan pada bulan Oktober 2015. Dalam pengalokasian biaya pendidikan tidak terdapat biaya perawatan gedung dan wifi sebab kedua biaya tersebut dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Penyusunan anggaran setiap tahun untuk Rumah Bahasa Surabaya tersebut memiliki kesamaan dengan sekolah-sekolah pada umumnya dimana sekolah-sekolah pada umumnya membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang disusun setiap tahun pada tahun ajaran awal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina Leoparti yang merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen bahwa perencanaan pembiayaan dimulai dengan rapat koordinasi untuk menentukan RKAS yang melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, Kepala Tata Usaha, Ketua Jurusan, Wakil Kepala Sekolah dan Perwakilan Yayasan. Rapat koordinasi tersebut membahas tentang RKAS sekolah yang berisi tentang sumber dana untuk membiayai pendidikan dan pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tim tersebut bekerja membuat rincian kegiatan selama satu tahun dan merencanakan estimasi dana sesuai dengan sumber dana yang ada.

Sehubungan dengan penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan untuk Rumah Bahasa Surabaya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan peraturan di lingkungan pengelolanya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan peraturan yang ditetapkan di Negara Indonesia yaitu terdapat pada Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan untuk Rumah Bahasa Surabaya digunakan dalam kebutuhan sehari-harinya yang telah dipetakan dalam setahun. Namun, ada beberapa kebutuhan yang tidak dipetakan dalam anggarannya yaitu pengeluaran perawatan gedung yang digunakan dan gaji 85 tenaga pendidik. Gedung yang digunakan oleh Rumah Bahasa Surabaya merupakan Gedung Balai Pemuda milik Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Selain gedung, 85 tenaga pendidik yang dimaksud merupakan tenaga pendidik relawan yang bisa disebut *volunteer*. Tidak ada gaji untuk tenaga pendidik relawan, namun ada konsumsi berupa kue dan air gelas yang diberikan jika ada jam mengajar di hari tertentu. Selain itu, tenaga pendidik relawan juga mendapatkan sertifikat dari pihak pengelola Rumah Bahasa Surabaya. Dari beberapa faktor itulah Rumah Bahasa Surabaya bisa berkembang sehingga dapat menyelenggarakan pembelajaran 13 bahasa.

Berdasarkan analisis temuan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pengelola Rumah Bahasa Surabaya mampu menarik minat Warga Kota Surabaya, Warga Luar Kota Surabaya, maupun Warga Negara Asing untuk menjadi tenaga pendidik *volunteer* di Rumah Bahasa Surabaya dan juga mendaftar sebagai peserta didik. Selain itu, pengelola Rumah Bahasa Surabaya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya mampu memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya sendiri seperti Gedung Balai Pemuda.

D. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan, Rumah Bahasa Surabaya memiliki tata kelola yang berbeda dengan lembaga lainnya. Pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya ikut di dalam keuangan Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan mendelegasikan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya. Maka, akuntabilitas keuangannya pun berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam kegiatan akuntabilitas tersebut terdapat beberapa unsur yang membuat pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya berhasil melaksanakan kegiatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut.

1. Kepemimpinan

Dalam kegiatan akuntabilitas, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi memimpin Stafnya supaya tepat waktu dalam melaporkan keuangan. Keadaan tersebut membuat Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi bersikap memaksa kepada Stafnya supaya menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perintah. Selain itu, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi

memiliki sikap terbuka kepada Stafnya. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi memberikan saran yang bijaksana kepada Stafnya apabila Stafnya memiliki kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya.

2. Koordinasi

Dalam kegiatan akuntabilitas pembiayaan pendidikannya, Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi mengkoordinasi Stafnya mengenai kegiatan laporan keuangan. Laporan keuangan dilaporkan setiap hari pada aplikasi *online e-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi mengingatkan Stafnya saat Stafnya lengah atau bahkan lupa untuk melaporkan keuangan setelah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan.

3. Legitimasi dan akseptasi

Dalam kegiatan akuntabilitas di Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, legitimasi terlihat bahwa Bagian Kerjasama berada dalam naungan Pemerintah Kota Surabaya dimana Pemerintah Kota Surabaya merupakan lembaga publik yang telah diakui masyarakat atas kekuasaan dan keberadaannya. Keputusan-keputusan yang ada dalam penyelenggaraan Rumah Bahasa Surabaya telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan akseptasi terlihat dalam pengalokasian pembiayaan pendidikan untuk Rumah Bahasa Surabaya. Penerimaan pembiayaan pendidikan oleh Rumah Bahasa Surabaya tersebut berupa barang dimana penerimaan tersebut dapat dibuktikan secara tertulis melalui nota yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Kegiatan akuntabilitas pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya yang dikelola oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya menggunakan beberapa jenis akuntabilitas pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut.

a. Akuntabilitas Sistem

Pengelola pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya sekaligus instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menggunakan akuntabilitas sistem yang bernama *E-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Laporan keuangan dilakukan setiap saat yaitu setelah berbelanja kebutuhan. Jenis akuntabilitas sistem tersebut terdapat pada teori yang dikemukakan oleh

b. Akuntabilitas Vertikal

Pengelola pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya menggunakan akuntabilitas vertikal. Mereka melaporkan keuangannya kepada Wali Kota Surabaya melalui aplikasi *online e-delivery* Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya dapat

memantau transaksi keuangan Staf-stafnya melalui aplikasi *online* tersebut.

c. Akuntabilitas Eksternal

Selain menggunakan akuntabilitas sistem dan vertikal, Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya juga melaporkan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu tahun sekali.

Ketiga unsur yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya yang telah dipaparkan sebelumnya ada dalam beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas yang seperti dikemukakan oleh Rosjidi (2001:148-150) bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi akuntabilitas adalah (1) kepemimpinan, (2) debat publik, (3) koordinasi, (4) otonomi, (5) eksplisit dan klaritas, (6) legitimasi dan akseptasi, (7) negosiasi, (8) sosialisasi dan publikasi, (9) umpan balik dan evaluasi, dan (10) adaptasi dan daur ulang. Unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan akuntabilitas keuangan Rumah Bahasa Surabaya adalah poin pertama yaitu kepemimpinan, poin ketiga yaitu koordinasi, dan poin kelima yaitu eksplisit dan klaritas.

Unsur yang mempengaruhi akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya pada poin pertama yaitu kepemimpinan sejalan dengan teori Rosjidi (2001:148-150) bahwa kepemimpinan yang memiliki kepekaan (sensitivitas) yang tinggi, responsif, akuntabel, dan terbuka baik terhadap bawahannya maupun dalam mencermati kompleksitas persoalan yang timbul dalam masyarakat, yang harus diselesaikan berdasarkan skala prioritasnya dengan tanpa mengabaikan integrasi persoalan secara keseluruhannya, merupakan kualifikasi, spesifik, guna mendukung praktik akuntabilitas dari tingkat paling bawah sampai dengan hierarki tertinggi. Unsur yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan di Rumah Bahasa Surabaya selanjutnya pada poin kedua yaitu koordinasi yang sejalan dengan teori Rosjidi (2001:148-150) adagium yang menyatakan "koordinasi adalah mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan" adalah kenyataan empirik yang sering dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektoral. Namun hal tersebut bukanlah hal yang tidak bisa ditiadakan, karena ada beberapa media yang secara efektif bisa dipakai sebagai sarana komunikasi.

Sedangkan unsur yang mempengaruhi akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya ada pada poin keenam yaitu legitimasi dan akseptasi. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rosjidi (2001:148-150) visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, faktor kunci keberhasilan, definisi operasional, sifat, dan standar akuntabilitas, harus dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh respon, legitimasi, dan akseptasi publik.

Kegiatan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya yang telah dipaparkan

sebelumnya menggunakan jenis akuntabilitas sistem yang terdapat pada salah satu jenis akuntabilitas pembiayaan pendidikan dalam teori Akdon, dkk. (2015:98-102) yang menyatakan bahwa jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari 9 yaitu (1) akuntabilitas keberhasilan, (2) akuntabilitas profesional (*professional accountability*), (3) akuntabilitas sistem (*system accountability*), (4) akuntabilitas birokrasi (*bureaucratic accountability*), (5) akuntabilitas hukum (*legal accountability*), (6) akuntabilitas profesional (*professional accountability*), (7) akuntabilitas politik (*political accountability*), (8) akuntabilitas moral (*moral accountability*), dan (9) akuntabilitas pasar (*market accountability*).

Akdon, dkk. (2015:98-102) menjelaskan juga bahwa akuntabilitas sistem (*system accountability*). Secara keseluruhan sistem pendidikan hendaklah akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan (fasilitas) yang telah diberikan oleh masyarakat. Dalam menjalankan akuntabilitas yang menyangkut dirinya sendiri itu, suatu sistem harus mampu mengukur pencapaian siswa, serta menghubungkan hasil pengukurannya itu dengan tujuan, dengan harapan masyarakat, dengan sumber-sumber yang telah tersedia dan dimanfaatkan, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah digunakan.

Selain menggunakan jenis akuntabilitas sistem, pengelola pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya juga menggunakan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas tersebut terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Haryanto (Sutedjo, 2009:36), bahwa akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni: (1) akuntabilitas vertikal, dan (2) akuntabilitas horisontal. Namun, pengelola pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya hanya melaksanakan akuntabilitas vertikal. Haryanto (Sutedjo, 2009:36) menjelaskan juga bahwa akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban kepada dinas pemerintah daerah.

Jenis akuntabilitas lainnya yang digunakan oleh pengelola pembiayaan pendidikan Rumah Bahasa Surabaya yaitu akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas tersebut terdapat pada teori yang dikemukakan oleh Rosjidi (2001:145), bahwa akuntabilitas dikategorikan menjadi dua yaitu: (1) akuntabilitas internal, dan (2) akuntabilitas eksternal. Namun, pengelola keuangan Rumah Bahasa Surabaya yaitu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya hanya melaksanakan akuntabilitas eksternal. Rosjidi (2001:145), juga menjelaskan bahwa akuntabilitas eksternal melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun

perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).

Meskipun kegiatan akuntabilitas pembiayaan pendidikan tidak melibatkan Staf Rumah Bahasa Surabaya, kegiatan pembelajaran di Rumah Bahasa Surabaya tetap berjalan dengan lancar. Kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya dicukupi oleh Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Simpulan

1. Komponen yang dibiayai di Rumah Bahasa Surabaya yaitu biaya langsung yang terdiri dari biaya operasional pembelajaran dan biaya personalia.
2. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya dan diberikan kepada Rumah Bahasa Surabaya berupa barang.
3. Tata cara pengalokasian biaya pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya berdasarkan kebutuhan yang dianggarkan per tahun.
4. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Rumah Bahasa Surabaya berada pada lingkungan pengelola keuangannya yaitu di lingkungan Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan akuntabilitasnya dipengaruhi oleh unsur kepemimpinan, koordinasi, serta legitimasi dan akseptasi. Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya menggunakan jenis akuntabilitas sistem, vertikal, dan eksternal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak pengelola Rumah Bahasa Surabaya maupun pihak-pihak yang terkait lainnya dalam penelitian ini. Beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Supaya pengalokasian anggaran berjalan maksimal, maka perlu Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya melibatkan Staf Rumah Bahasa Surabaya dalam kegiatan akuntabilitas keuangan. Hal ini perlu dilakukan supaya Staf Rumah Bahasa Surabaya mengetahui berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk Rumah Bahasa Surabaya, sehingga bermanfaat dalam kegiatan penggaran dana untuk Rumah Bahasa Surabaya.
2. Melibatkan Staf Rumah Bahasa Surabaya dalam membelanjakan kebutuhan. Hal ini dilakukan supaya ada keterbukaan mengenai jumlah dana yang dibelanjakan untuk kebutuhan Rumah Bahasa Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, dkk. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fattah, Nanang. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.

Kompasiana. 2015. *MEA dan Pendidikan Yang Berkualitas*. (Online). (http://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/mea-dan-pendidikan-yang-berkualitas_55530d2db67e611308130970 diakses 28 Februari 2016)

Leonarti P., Agustina. 2015. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. (Online). (<http://eprints.ums.ac.id/37484/1ARTIKEL%20PUBLIKASI%20ILMIAH.pdf> diakses 11 April 2016)

Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. (Online) (<http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1027.pdf> diakses 9 April 2016)

Republik Indonesia. 2001. *Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. (Online). (<http://stmik.teknokrat.ac.id/peraturan/uud1945.pdf> diakses 9 April 2016)

Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara*. (Online) (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/17TAHUN2003UU.htm> diakses 9 April 2016)

Rosjidi. 2001. *Akuntabilitas Sektor Publik Pemerintah*. Surabaya: Aksara Satu.

Sutedjo. 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)*. Tesis dipublikasikan. (Online). (<http://core.ac.uk/download/files/379/11723215.pdf> diakses 22 Januari 2016)